

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Membicarakan manusia merupakan suatu topik yang selalu menarik dan tidak akan ada habisnya karena kompleksitas manusia itu sendiri. Manusia memiliki dimensi-dimensi yang unik untuk dibahas dan diteliti. Manusia secara garis besar memiliki dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek psikologis yang terus berkembang selama hidupnya. Manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah SWT bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dibalik kelebihan yang luar biasa terdapat juga kelemahan yang ada pada diri manusia yang harus diminimalisir dengan diarahkan dan dikembangkan potensinya melalui pendidikan.¹

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia bahkan Allah dalam Al Qur'an menyindir dengan sangat keras yaitu dengan ungkapan -Hal yastaswilladzina ya'lamuun wa laa ya'lamuun|| yang artinya apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu.

¹ Umar Tirtaraharja dan S. L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT Adi Mahasatya, 2005).76

Melalui pendidikan manusia akan mengerti motivasi tingkah laku atau perbuatan secara hakiki.²

Pendidikan merupakan aspek dan hasil terbaik yang mampu disediakan setiap generasi sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan manusia karena manusia merupakan *animal educandum* (mahluk yang dididik) dan *animal educandus* (mahluk yang mendidik). Dengan proses tersebut terjadi pewarisan budaya dan peradaban serta pengembangannya yang sangat berguna bagi setiap generasi dalam menjalani kehidupan di dunia.³

Sebagai sebuah proses, pendidikan berkembang dan berjalan semakin masif dan sistematis maka sampailah dibentuk sebuah lembaga yang memang menangani pendidikan dalam rangka mewariskan ilmu dan budaya serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Lembaga tersebut bernama sekolah atau madrasah yang telah berkembang di setiap tempat di belahan-belahan negeri.

Indonesia sebagai sebuah negara menyadari bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi hak bagi setiap warganya dan hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal

31 ayat 1 s/d 3 yang berbunyi : -(1) Setiap warga negara berhak

² Safaruddin Safaruddin, “*Konsep Manajemen Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an*,”
Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan 6, no. 2 (2020): 131–151.

³ Muzamil Muzamil, “Urgensi Pendidikan Islam Dalam Memprogresivitasakan Sumberdaya Manusia Di Era Pandemi Covid-19,” *journal PIWULANG* 3, no. 1 (2020): 65.

mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, serta (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴

Penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia yang bertujuan mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa ternyata menemui banyak sekali permasalahan antara lain : peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran, belum terpenuhinya sumberdaya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Akan tetapi permasalahan tersebut telah diupayakan pemecahannya dengan berbagai upaya dengan mengesahkan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut. .

Pembenahan yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan mengatur pembiayaan pendidikan yang merupakan komponen yang urgen dalam keberhasilan pendidikan di Indonesia dengan melakukan regulasi-regulasi yaitu :

⁴ Armida, -Model Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia, || *Akademika, Fak. Adab IAIN Sultan Thaha, Vol.26, No.1* 26 (2011).27

1. UUD 1945 (amandemen IV) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan Belanja Daerah (APBD).
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 11 Ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitik beratkan pada upaya mendistribusikan *benefit* pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Pengertian biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelajarkan atau jasa layanan yang diserahkan kepada siswa.⁵

Tidak bisa dipungkiri bahwa anggaran untuk pembiayaan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah masih belum mampu memenuhi kebutuhan operasional lembaga pendidikan bahkan masih jauh dari kata cukup. Keterbatasan ini akan menghambat pelaksanaan proses yang ada di lembaga pendidikan. Hal ini disebabkan pembiayaan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*Instrumental*

⁵ Nanang Fattah, “*Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori Dan Studi Empiris*” (2008): 417–436.

input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau madrasah.⁶

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilaksanakan sekolah memerlukan biaya atau dana.

Di era globalisasi ini tiap lembaga pendidikan dituntut untuk terus menerus meningkatkan kualitas karena persaingan-persaingan bukan hanya banyaknya lembaga-lembaga baru yang bermunculan dari dalam negeri akan tetapi persaingan semakin terasa berat karena ada keleluasaan pihak-pihak asing mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia.

Lembaga pendidikan sebagai penyelenggara (dalam konteks mikro) proses pendidikan dalam setiap tahun menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah. Rencana pendapatan dan penggunaannya menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dan

⁶ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Press, 2014). 38

dengan RAPBS/M itu terdapat jaminan akan terlaksananya atau terselenggarakannya proses pendidikan.⁷

Pembiayaan bagi pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau madrasah. Dalam setiap kegiatan atau proses pencapaian tujuan pendidikan, biaya atau pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat vital dan menentukan. Bahkan hampir tidak ada kegiatan pendidikan yang mengabaikan peran biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak akan berjalan secara maksimal tanpa didukung atau ditopang dengan biaya yang memadai.

Sistem pembiayaan pendidikan pada masing-masing lembaga pendidikan sangat bervariasi tergantung pada kondisi masing-masing lembaga pendidikan yang meliputi : kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Selain dari itu, biaya pendidikan juga ditentukan oleh : besar kecilnya institusi pendidikan , jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen, rasio siswa berbanding guru atau dosen , kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk.

Pelaksanaan PP No 19 tahun 2005 membawa dampak pada perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen

⁷ Mulyasa, "Manajemen Berbasis Sekolah" (2009). 21.

biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya pada satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Dengan standar nasional pendidikan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diseluruh Indonesia.

Standar pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan menjadi jaminan terselenggaranya proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan.

Lembaga pendidikan banyak menghadapi masalah dalam memenuhi standar pembiayaan yang telah ditetapkan apalagi bila lembaga pendidikan tersebut memiliki program-program peningkatan mutu. Mengelola pembiayaan dengan program-program mutu tersebut telah memaksa kepala sekolah/madrasah untuk mengembangkan sumber-sumber dana pendidikan. Pengembangan sumber pembiayaan pendidikan merupakan upaya mengembangkan sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar.

Menurut Syarifuddin, dunia pendidikan harus memenuhi beberapa hal: (1) perbaikan manajemen sekolah, (2) Persediaan tenaga kependidikan yang profesional, (3) perubahan budaya sekolah (visi, misi,

tujuan dan nilai), (4) peningkatan pembiayaan pendidikan dan (5) mengoptimalakan dukungan masyarakat terhadap pendidikan.⁸

Pengelolaan dana atau pembiayaan pendidikan telah diatur dalam undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 48. Dalam undang-undang tersebut telah ditegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, trnsparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut harus mendapat penekanan dan perhatian oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Tujuan dengan prinsip tersebut adalah agar sistem pendidikan yang ada dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pelaksanaan prinsip keadilan dalam menajemen pembiayaan pendidikan seringkali menemui kendala pada hal yang terkait dengan pembiayaan-pembiayaan baik operasional, investasi dan personal yang harus ditanggung oleh peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga sering kali terjadi hak memperoleh pendidikan harus terhalang karena keterbatasan masalah kemampuan ekonomi.

Program pengembangan lembaga pendidikan selalu merujuk pada visi dan misi selalu yang ditetapkan dan di jabarkan dalam renstra dan *action plant* harus disosialisasikan kepada pemangku kepentingan agar dimengerti dan bersama-sama memberikan sumbangsih untuk

⁸ Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu* (Jakarta: Grasindo, 2002).56

mewujudkannya. Selain dari pada itu sangat penting adanya keterbukaan sehingga dapat menumbuhkan saling percaya antara lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan yang ada.

Program lembaga pendidikan yang tersusun dalam RAKS ataupun RAPBS/RAPBM harus dapat dikontrol dan dievaluasi ketercapaiannya secara periodik oleh kepala sekolah dengan dasar-dasar standar yang telah ditetapkan sebagai keberhasilan sebuah program.

Sering kali kita membaca dan mendengar bahwa adanya pengelolaan dana bantuan pendidikan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat malah menjadi permasalahan yang besar. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan para pemangku kepentingan pendidikan masih cukup rendah. Selain itu sering kali terjadi pihak sekolah justru kurang transparan dan kurang akuntabel dalam memberikan data dan informasi yang dikelola kepada semua pihak yang terkait (*stakeholders*).

MA Ma'arif atau lebih dikenal dengan Ma al Ma ini berada di desa Bakung Kecamatan Udananawu Kabupaten Blitar berdiri pada tahun 1984 dan terus mengalami perkembangan sampai sekarang. Perkembangan ini meliputi prestasi, sarana dan prasaran, jumlah siswa, guru dan karyawan hingga mulai tahun 14 September 2004 telah ditetapkan nilai akreditasinya dengan nilai A (unggul) bahkan sampai sekarang tetap konsisten menyanggah gelar nilai akreditasi A. Kondisi tersebut menjadikan lembaga pendidikan ini menjadi lembaga kebanggaan umat Islam di Blitar

khususnya warga Nahdliyyin. Hal ini disebabkan prestasi-preaatasi yang torehkan oleh MA Ma'arif sangat mengagumkan baik ditingkat kabupaten, propinsi maupun tingkat nasional bahkan internasional baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Prestasi-prestasi terekam dalam bingkai administrasi berupa buku prestasi siswa juga bukti berjajar piala-piala yang tertata berjajar di etalase yang melimpah.

MA Ma'arif menerapkan sistem pendidikan *tree in one* maksudnya adalah siswa yang sekolah di lembaga pendidikan tersebut akan mendapatkan tiga keuntungan sekaligus yaitu paham agama Islam, bisa ketrampilan dan bisa pelajaran sesuai dengan kejuruan misalnya IPA atau IPS. *Tree in one* bukan sekedar program gagah-gagahan akan tetapi benar benar merupakan program yang disusun dengan cermat dan dilaksanakan dengan komitmen tinggi. Ini terbukti dengan diraihnya nilai UN tertinggi Madrasah Aliyah se-Kabupaten Blitar. Siswa tersebut bernama Mohammad Imam Bahruddin Kelas XII IPA. Selain itu juga ada delapan siswa yang mewakili Kabupaten Blitar dalam Kompetisi Sains Madrasah tingkat propinsi Jawa Timur.

Dalam bidang program unggulan, ada siswa yang masuk kedalam 10 besar terbaik dalam pelatihan ptomotif tingkat nasional. Mereka adalah Mohammad Abdul Muhsin, Soko Rahayu, Joko Supriyanto, Ahmad Wahyu Riza dan Mohammad Aris Santoso.

Dengan fasilitas dan prestasi yang telah diraih berimbas pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap MA Ma'arif. Hal ini terbukti semakin banyak calon-calon siswa yang mendaftarkan diri untuk bersekolah di lembaga tersebut. Dari tahun ke tahun jumlah siswa semakin banyak dan tercatat ada 1828 siswa yang masuk ke dalam 45 rombongan belajar.

Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi telah mendorong untuk selalu mengembangkan sarana dan prasarana yang dimiliki demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan pada tahun 2023 telah tampak pengembangan sarana dan prasarana yang representatif dan unggul. Pengembangan Sarana dan prasaran dikembangkan ada yang selesai dalam satu tahun anggaran dan ada juga yang multi tahun anggaran.

Pengelolaan sumberdaya yang bagus telah menjadikan MA Ma'arif menjadi lembaga yang bukan hanya sebagai solusi tapi menjadi tujuan pendidikan bagi generasi-generasi di kabupaten Blitar dan daerah lainnya.

Sedangkan SMA NU 1 Gresik atau juga dikenal dengan nama SMANUSA Gresik didirikan oleh tokoh-tokoh pendidikan Nahdlatul Ulama' yang berada di kota Gresik pada tahun 1968. Lembaga ini menggunakan nama Nahdlatul Ulama' karena berbasis ASWAJA akan tetapi dengan tidak meninggalkan pola-pola pendidikan moderen.

Perjalanan SMA Nahdlatul Ulama' 1 Gresik mengalami jatuh bangun bahkan pernah dalam satu angkatan/tahun pelajaran hanya mendapatkan siswa 14 anak. Pada saat itu, bila dibandingkan jumlah siswa dan jumlah guru maka lebih banyak jumlah gurunya. Akan tetapi dengan semangat dan kegigihan guru-guru dan pimpinan sekolah, lambat laun SMA NU 1 Gresik berubah menjadi sekolah berprestasi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang tinggi sehingga setiap tahunnya banyak calon siswa yang berebut dan bersaing untuk bersekolah di SMA NU 1 Gresik. Untuk dapat masuk ke sekolah tersebut harus melalui seleksi yang ketat dengan jumlah penerimaan siswa yang terbatas, hal ini dikarenakan terbatasnya daya tampung yang ada.

Perkembangan SMA NU 1 Gresik pada lima tahun terakhir sangat membanggakan, ini terjadi karena kaderisasi guru dapat berjalan dengan baik dan juga banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh seluruh komponen sekolah. Misalnya mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi baik perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Untuk perguruan tinggi dalam negeri contohnya ISI Surakarta yang pernah melakukan seleksi untuk calon mahasiswanya di SMA NU 1 Gresik. Dan untuk perguruan tinggi luar negeri terdapat perguruan tinggi dari China, Taiwan, Jepang dan Korea Selatan yang juga melakukan seleksi calon mahasiswanya di SMA NU 1 Gresik.

Konsep pengembangan SMA NU 1 Gresik mengikuti konsep ikan berenang melawan arus dan pelayanan terpadu artinya jika jika kita melihat ikan-ikan di tambak , hanya ikan-ikan yang berani berenang melawan arus saja yang akan bertahan sedangkan ikan yang mengikuti arus akan terseret dan hilang. Contohnya ketika SMA NU 1 Gresik tidak ditujuk untk menjalankan Kurikulum 2013, tetapi dengan berani tetap melaksanakan kurikulum secara mandiri. Banyak kegiatan yang ditinggalkan ileh banyak sekolah tapi justru SMA NU 1 Gresik mengembangkannya.

Pelaksanaan konsep pengembangan sekolah harus dibarengi dengan pelayanan terpadu sebab jika tidak maka kaonsep hanya sekedar konsep. Didalam pelayanan terpadu dilaksnakan gerakan 3P : —Penampilan,

Pelayanan dan Prestasi. – untuk P pertama adalah Penampilan, maksudnya penampilan sekolah harus dibenahi. Kegiatan ini dimulai dengan mengubah tata ruang, baik ruang kelas, ruang guru, ruang administrasi, ruang laboratorium, dan ruang-ruang lainnya. Perubahan juga dilakukan untuk eksterior agar tampak rapi dan bersih. Setelah itu perubahan berikutnya adalah perubahan pada budaya bagi warga sekolah agar senang pada kebersihan, rapi, dan mengedepankan keteladanan sopan santun.

Konsep P yang kedua adalah pelayanan, maksudnya adalah pelayanan yang diberikan guru dan pegawai kepada siswa, masyarakat dan stakeholder yang baik merupakan kunci keberhasilan sekolah. Bentuk

pelayanan ini adalah dibukanya jurusan IPA, IPS dan bahasa/budaya dengan tujuan dapat melayani semua atau berbagai bakat dan minat siswa. Selain dari pada itu untuk meningkatkan pelayanan, telah disiapkan ekstra kurikuler yang berjumlah 39 macam ekstra kurikuler. Dan untuk menjalankan ekstra kurikuler yang banyak tersebut harus dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas.

Konsep P yang ketiga adalah prestasi maksudnya prestasi ini akan dapat diraih setelah sekolah mengedepankan penampilan dan pelayanan maka prestasi akan dapat diraih atau dicapai baik prestasi bertaraf daerah, propinsi, nasional maupun internasional.

Lembaga pendidikan SMA NU 1 Gresik telah mampu membuktikan diri sebagai lembaga yang berprestasi baik dalam bidang akademik dan non akademik dan juga kelengkapan sarana prasarana yang representatif dan unggul bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan lain di Gresik. Sehingga tidak heran apabila SMA NU 1 Gresik telah dikunjungi oleh 19 negara selain telah melakukan kerjasama dengan 24 lembaga pendidikan luar negeri.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis menentukan fokus penelitian sebagai berikut: Penerapan Prinsip Manajemen Pembiayaan Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulis tetapkan, maka dapat dikembangkan kedalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan prinsip keadilan manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan ?
- b. Bagaimana penerapan prinsip efisiensi manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan ??
- c. Bagaimana penerapan prinsip transparansi manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan ?
- d. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah :

Untuk menjelaskan penerapan prinsip-prinsip manajemen pembaiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, antara lain :

1. Secara teorotis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan masukan dalam bidang manajemen khususnya manajemen pembiayaan pendidikan.

2. Secara praktis

a. Bagi kepala sekolah

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan yang dipimpin.

b. Bagi majlis madrasah atau komite sekolah mengerti bagaimana seharusnya mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen sehingga akan dapat berperan serta dalam pencapaian tujuan sekolah dengan efektif.

c. Bagi guru baik yang masuk dalam tim pengembang maupun yang tidak akan mendapatkan pengetahuan baru dan berperan serta sesuai dengan kapasitasnya dalam mengelola keuangan dalam mengembangkan sarana dan prasarana yang ada.

d. Bagi pembaca dan peneliti yang akan datang

Dengan hasil penelitian ini dapat menjadi bacaan, dasar, wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan menjadi landasan bagi lembaga pendidikan khususnya lembaga yang telah diteliti dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang lebih baik.

E. Penegasan Istilah

Kata atau istilah yang peneliti gunakan dalam judul, perlu untuk dijelaskan atau diuraikan untuk menghindari kesalahan penafsiran

dan pemahaman yang kurang tepat. Selain dari pada itu untuk memberikan gambaran yang jelas dalam memahami maksud judul dari disertasi ini, yaitu Manajemen Pembiayaan Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan di MA Ma'arif Blitar dan SMA NU 1 Gresik.

Adapun penegasan istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan merupakan dua kata yang dirangkai menjadi rangkaian kata yang mengandung satu kesatuan pengertian. Rangkaian kata tersebut apabila dipisahkan antara satu dengan yang lain yaitu terdiri dari kata manajemen dan pembiayaan. Manajemen menurut Stoner yang dikutip oleh T Hani, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁹

Manajemen merupakan suatu proses atau suatu kegiatan yang berkesinambungan dan terus menerus dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan atau proses itu terdiri dari

⁹ T Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003).26

kegiatan planing, organising, actuiting dan controlling.¹⁰ Sedangkan kata yang kedua adalah pembiayaan yang berarti sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa.¹¹ Dan kalau dirangkai dengan kata pendidikan maka arti dari pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumberdaya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan lembaga pendidikan. Sedangkan tujuan dari pada pembiayaan pendidikan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang diharapkan.¹²

Pengertian tentang pembiayaan pendidikan dapat dimengerti bahwa pembiayaan pendidikan sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan dan perbaikan sarana ruang belajar, pengadaan ATK , pengadaan buku, kegiatan pembe ekstrakurikuler dan lain-lain.¹³

Sedangkan apabila kata manajemen dan pembiayaan pendidikan digabung, memiliki pengertian sebagai sebuah rangkaian

¹⁰ Mulyasa, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Prenadamedia group, 2006).43

¹¹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Arruz Media, 2010).279 .

¹² Dr. Nanang Fattah, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakur, 2004).

¹³ Nanang Fattah, *Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori Dan Studi Empiris.* ”

kegiatan atau aktifitas mengatur keuangan lembaga pendidikan dari proses perencanaan, pentatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan pendidikan.¹⁴ Jadi dapat dimengerti bahwa manajemen pembiayaan itu meliputi keseluruhan proses upaya memperoleh serta mendayagunakan seluruh dana dalam sebuah organisasi lembaga pendidikan.

Manajemen yang memiliki inti kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dapat berjalan dengan baik dan dapat mengembangkan lembaga pendidikan dengan maksimal apabila manajemen dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang ada pada manajemen pembiayaan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Maka penulis atau peneliti dalam disertasi ini akan fokus pada penelitian penerapan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan pada situs yang telah peneliti pilih.

b. Pengembangan Lembaga Pendidikan

Istilah pengembangan dapat bermakna kuantitatif dan kualitatif. Menurut makna kuantitatif maksudnya bagaimana lembaga pendidikan menjadi lebih besar, merata dan luas pengaruhnya dalam konteks pendidikan. Sedangkan menurut makna kualitatif adalah

¹⁴ Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan* (2007: Pustaka Book Publisher, 2007).

bagaimana menjadikan lembaga lebih bermutu, lebih baik dan lebih maju di tengah-tengah banyaknya lembaga yang bermunculan.¹⁵

Bila ditinjau dari sisi gramatikal, kata pengembangan berasal dari kata kembang, yang bermakna mekar terbuka atau membentang, menjadi lebih besar dan menjadi sempurna. Sedangkan menurut istilah, pengembangan berarti suatu proses, perbuatan atau cara mengembangkan. Jadi maksud dari pengembangan proses perubahan dari komponen-komponen sistem ke arah yang lebih baik.¹⁶

Uraian konseptual di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen pengembangan lembaga pendidikan adalah suatu upaya sistematis dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2. Penegasan Operasional

Penelitian dengan judul manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di SMU NU 1 Gresik dan MA Ma'arif Blitar maksudnya adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan yang diberlakukan atau dilaksanakan oleh ke dua lembaga pendidikan tersebut dalam mengembangkan lembaga pendidikan.

¹⁵ Nur Efendi, *Model Pengembangan Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Kali Media, 2015).

¹⁶ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah Dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Pengembangan lembaga pendidikan yang dimaksud dalam disertasi ini adalah pengembangan sarana prasarana pendidikan yang terdapat di SMU NU 1 Gresik dan MA Ma'arif Blitar, pengembangan sarana dan prasarana ini meliputi pengadaan beberapa macam alat pembantu dalam media pembelajaran seperti era dulu menggunakan papan, sekarang berubah menggunakan proyektor ketika menjelaskan materi. Selebihnya pengembangan lembaga pendidikan akan di uraikan lebih banyak dalam temuan penelitian di bab selanjutnya. dalam pengembangan sarana prasarana tadi tentunya akan membutuhkan manajemen pembiayaan.